

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian dan kekhawatiran banyak negara di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh dampak yang signifikan yang telah dihasilkan pada berbagai aspek kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan.¹ Perubahan iklim secara signifikan tersebut meningkatkan kemungkinan cuaca ekstrem, mulai dari gelombang panas hingga banjir.² Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu negara, tetapi dapat menyebar ke negara-negara lain dan menimbulkan konflik antar negara karena sifatnya yang global, perubahan iklim mendorong munculnya berbagai upaya internasional dalam mengatasi masalah ini.³

Hutan tropis memegang peran penting dalam sistem iklim global karena dapat menyimpan banyak karbon dan mengatur aliran energi dan air. Brazil sebagai negara yang memiliki luas hutan hujan Amazon yang luas memiliki potensi besar dalam menyimpan karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca.⁴ Brazil menyadari betapa pentingnya menjaga keanekaragaman

¹ Lola Malihah, "Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17, no. 2 (Desember 21, 2022): 219–232, <https://jkjournal.com/index.php/menu/article/view/272>.

² Daniel L. Swain et al., "Attributing Extreme Events to Climate Change: A New Frontier in a Warming World," *One Earth* 2, no. 6 (Juni 2020): 522–527, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2590332220302475>.

³ Renny Candradewi Puspitarini, Runitya Batan, dan Randy Bion Bramastya, "Peran Organisasi Internasional dalam Atasi Perubahan Iklim dalam UNFCCC," *Sospoli Institute Journal* 2, no. 1 (2022): 1–8.

⁴ Britaldo Soares-Filho et al., "Role of Brazilian Amazon protected areas in climate change mitigation," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 107, no. 24 (Juni 15, 2010): 10821–

hayati dan mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Brazil melakukan peran aktif dalam upaya internasional untuk mengatasi tantangan lingkungan global, khususnya dalam bidang mitigasi perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati.⁵ Salah satu bukti nyata dari peran Brazil dalam isu lingkungan adalah peran Brazil pada masa pemerintahan Presiden Fernando Collor de Mello yang melakukan pengorganisasian Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, yang juga dikenal sebagai Konferensi Bumi atau Earth Summit. Konferensi ini menjadi tonggak penting dalam upaya internasional untuk menangani isu-isu lingkungan global, termasuk perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.⁶

Konferensi Bumi pada tahun 1992 ini menghasilkan beberapa dokumen penting, termasuk salah satunya adalah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim.⁷ Pada masa pemerintahan Collor, Pemerintah memposisikan lingkungan sebagai salah satu prioritas utama setelah ekonomi . Langkah-

10826, <https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.0913048107>.

⁵ Christopher Kurt Kiessling, "Brazil, Foreign Policy and Climate Change (1992-2005)," *Contexto Internacional* 40, no. 2 (September 3, 2018): 387–408, http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292018000200387&lng=en&tlng=en.

⁶ United Nations, "United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) - Rio de Janeiro, Brazil 3 to 14 June 1992," diakses tanggal 15 Maret 2023, <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992>.

⁷ Brazil. Ministry of the Environment, *Third National Communication of Brazil to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Brasília: Ministry of the Environment, 2016), hal. 12.

langkah konkret dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Lahirnya Konvensi Internasional dalam Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati pada tahun 1992 di Brazil sukses membuat Brazil menjadi pelopor dalam kebijakan perubahan iklim dan diplomasi lingkungan.⁸

Pada masa kepresidenan Fernando Henrique Cardoso terdapat berbagai upaya untuk mengatasi isu lingkungan di Brazil, termasuk meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2002, yang menetapkan kewajiban Brazil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.⁹ Pada masa presiden berikutnya yaitu pemerintahan Lula da Silva, tahun 2009 Brazil menjadi salah satu negara pertama yang menandatangani Kesepakatan Kopenhagen, sebuah kesepakatan internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global.

Pemerintahan Lula juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi deforestasi di Amazon, yang merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca di Brazil. Selama masa pemerintahannya, tingkat deforestasi di Brazil berhasil turun sebanyak 67 persen.¹⁰ Penurunan deforestasi yang signifikan selama pemerintahan Lula disebabkan oleh berbagai kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan konservasi, seperti Amazon Fund dan Rencana Aksi untuk Pencegahan dan Pengendalian Deforestasi di

⁸ Herton Escobar, "Brazil's new president has scientists worried," *Science News* (2019), <https://www.science.org/content/article/brazil-s-new-president-has-scientists-worried-here-s-why>.

⁹ Climate Change Secretariat, "A guide to the climate change convention process," *Preliminary 2nd edition. Bonn* (2002).

¹⁰ How It Was Done, "Brazil's Success in Reducing Deforestation" (2011).

Wilayah Amazon Legal (PPCDAm).¹¹

Kesepakatan Kopenhagen sebelumnya pada tahun 2009, pada akhirnya tidak berhasil disetujui oleh semua negara, dan tidak secara resmi diadopsi sebagai kesepakatan internasional yang mengikat. Namun, usaha global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca terus berlanjut, dan pada tahun 2015 saat masa pemerintahan Presiden Dilma Rousseff, negara-negara dunia mencapai kesepakatan baru yang lebih komprehensif untuk melawan perubahan iklim, yaitu Paris Agreement. Perjanjian Paris (Paris Agreement) adalah perjanjian internasional yang tujuannya adalah untuk membatasi peningkatan suhu global di bawah 2 derajat Celsius di atas level praindustri, dengan usaha maksimal mencapai 1,5 derajat Celsius.¹²

Dalam kerangka perjanjian Paris, Brazil berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 37% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 2005,¹³ dan meningkatkan ambisi hingga 43% pada tahun 2030. serta mempromosikan energi terbarukan dan mengurangi deforestasi di Amazon.¹⁴ Namun meskipun deforestasi telah menurun pada tahun-tahun sebelumnya sebagai hasil dari kontrol pemerintah,¹⁵ terjadi peningkatan di bawah pemerintahan Bolsonaro, langkah-langkah pelemahan terlihat drastis dan agresif, hal ini menjadi

¹¹ Maya Forstater, Smita Nakhooda, dan Charlene Watson, "The effectiveness of climate finance: a review of the Amazon Fund," *London: Overseas Development Institute* (2013).

¹² Mark A Maslin, John Lang, dan Fiona Harvey, "A short history of the successes and failures of the international climate change negotiations," *UCL Open Environment* 5 (2023): e059.

¹³ Federative Republic of Brazil, "Paris Agreement: Nationally Determined Contribution (NDC)," diakses pada 16 maret 2023.

¹⁴ Andrew J Wiltshire et al., "Understanding the role of land-use emissions in achieving the Brazilian Nationally Determined Contribution to mitigate climate change," *Climate Resilience and Sustainability* 1, no. 1 (2022): e31.

¹⁵ Lizzie Wade, "With Brazil in political crisis, science and the environment are on the chopping block," *Science* (Mei 25, 2016).

faktor ancaman bagi keberlanjutan hutan.

Semenjak kampanye, Presiden Bolsonaro membuat janji untuk mengeluarkan Brazil dari Perjanjian Paris dan mengambil langkah-langkah yang dapat menyebabkan peningkatan signifikan dalam deforestasi dan emisi karbon dioksida. Hal ini mencerminkan gaya kepemimpinan Bolsonaro yang otoriter dan cenderung populis, di mana ia sering kali mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek dan meremehkan urgensi pengelolaan lingkungan.¹⁶

Bolsonaro, yang memiliki pandangan konservatif terhadap perubahan iklim, memandang kebijakan lingkungan yang ketat sebagai hambatan bagi pertumbuhan ekonomi negara, khususnya sektor agribisnis yang sangat penting bagi ekonominya. Meskipun kemudian ia mundur dari rencananya untuk menarik diri dari Perjanjian Paris, pemerintahannya telah menolak menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim persatuan bangsa-bangsa 2019 dan memotong pendanaan untuk program lingkungan.

Pemotongan anggaran ini dapat memiliki konsekuensi serius untuk pelestarian hutan, karena lembaga tersebut mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan efektif.¹⁷ Dalam laporan institut penelitian nirlaba Brazil (Imazon), Pada masa pemerintahannya hutan Amazon Brazil mengalami kerusakan paling

¹⁶ Feliciano de Sá Guimarães dan Irma Dutra De Oliveira E Silva, "Far-right populism and foreign policy identity: Jair Bolsonaro's ultra-conservatism and the new politics of alignment.," *International Affairs* 97, no. 2 (2021).

¹⁷ Eder Johnson de Area Leão Pereira, Paulo Jorge Silveira Ferreira, Luiz Carlos de Santana Ribeiro, Terciane Sabadini Carvalho, dan Hernane Borges de Barros Pereira, "Policy in Brazil (2016–2019) Threaten Conservation of the Amazon Rainforest," *Environmental Science & Policy* 100 (2019): 8–12.

signifikan dalam 15 tahun pada tahun 2022.¹⁸

1.2 Rumusan Masalah

Sejak Brazil menandatangani Konvensi Perubahan Iklim pada 1992, negara ini menjadi pelopor dalam kebijakan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan, terutama dalam menjaga hutan hujan Amazon. Namun, sejak Jair Bolsonaro terpilih sebagai Presiden pada 2018, kebijakan lingkungan Brazil mengalami perubahan signifikan. Bolsonaro mengkritik kebijakan lingkungan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan bahkan menyatakan niat untuk menarik Brazil dari Perjanjian Paris. Ia juga menolak tawaran PBB untuk menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim 2019 serta mengurangi anggaran lembaga lingkungan. Perubahan kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi Brazil, tetapi juga berdampak pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Brazil, sebagai negara dengan hutan hujan terbesar di dunia, memiliki peran penting dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, penting untuk memahami gaya kepemimpinan Bolsonaro terhadap kebijakan lingkungan Brazil dalam upaya global pengurangan emisi dan pencapaian *Net Zero Emissions*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian peneliti adalah “ Bagaimana gaya kepemimpinan Jair Bolsonaro mengenai kebijakan lingkungan Brazil terkait isu perubahan iklim dalam

¹⁸ Imazon, “Activity Report 2022” <https://imazon.org.br/publicacoes/activity-report-2022/>

Net Zero Emission?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti angkat sebelumnya maka tujuan dari penelitian kali ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis gaya kepemimpinan presiden Jair Bolsonaro dalam kebijakan lingkungan Brazil terkait isu perubahan iklim dibawah kepemimpinan Jair Bolsonaro yang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dari presiden sebelumnya.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai gaya kepemimpinan dalam kebijakan lingkungan, khususnya dalam konteks negara berkembang, serta kontribusinya terhadap perubahan kebijakan lingkungan yang berkaitan dengan *Net Zero Emissions* dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
- b. Secara praktis, penelitian ini nantinya pula diharapkan mampu berguna bagi masyarakat luas untuk memahami secara menyeluruh bagaimana gaya kepemimpinan dalam kebijakan lingkungan, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran analitis mengenai gaya kepemimpinan individu dalam perumusan kebijakan yang berkaitan *Net Zero Emissions* dan keberlanjutan lingkungan global.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis gaya kepemimpinan Jair Bolsonaro dalam perubahan kebijakan lingkungan Brazil terhadap Paris Agreement, peneliti menggunakan beberapa literatur yang relevan dalam membantu mengembangkan pengetahuan yang akan diteliti.

Tinjauan pustaka pertama merupakan tulisan yang berjudul “Deforestation of the Brazilian Amazon Under Jair Bolsonaro’s Reign: A Growing Ecological Disaster and How It May Be Reduced” yang ditulis oleh Richard Perez pada tahun 2021. Tulisan ini menjelaskan tentang deforestasi hutan hujan Amazon dan kebijakan pemerintahan Bolsonaro yang telah menjadi penyebab masalah ini. Bolsonaro telah mengabaikan hukum dan regulasi lingkungan, menutup mata terhadap deforestasi ilegal, dan meruntuhkan perlindungan lingkungan.

Deforestasi tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga masyarakat adat dan berkontribusi pada perubahan iklim. Temuan dari tulisan ini menyatakan bahwa mekanisme hukum domestik dan internasional yang ada tidak cukup untuk mengatasi deforestasi yang terjadi di hutan Amazon Brazil. Untuk mengurangi secara signifikan deforestasi ilegal, dunia memerlukan mekanisme hukum internasional baru yang dilengkapi dengan program domestik yang dapat ditegakkan. Kontribusi tulisan tersebut pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu memberi informasi dan penjelasan terkait otoritas hukum yang ada dalam menangani deforestasi di hutan hujan Amazon Brazil dan ketidakcukupan otoritas hukum lingkungan yang ada pada masa pemerintahan Jair Bolsonaro. Perbedaan penelitian tersebut antara penelitian ini ada pada

fokus penelitian, Pada penelitian ini peneliti lebih menjabarkan penjelasan terkait dominasi dan gaya kepemimpinan Jair Bolsonaro dan implikasinya terhadap kebijakan lingkungan Brazil pada masa pemerintahan presiden Jair Bolsonaro dalam konteks *Nett Zero Emissions*.

Tinjauan pustaka kedua merupakan artikel jurnal dari *Indonesian Journal of International Relations* dengan judul “Deforestasi Amazon Pada Era Bolsonaro (2019)”¹⁹ yang ditulis oleh Tine Ratna Poerwantika dan Muhammad Isfandiar Hatami. Artikel jurnal ini menjelaskan terkait dinamika deforestasi di hutan Brazil didorong oleh kebijakan pro pasar Bolsonaro dengan landasan kepentingan nasional dan berpengaruh pada perusakan lingkungan hidup di hutan tropis Amazon lewat deforestasi.

Temuan dari penelitian tersebut yaitu dinamika deforestasi di Brazil senyatanya berjalan secara dinamis, dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang saling berkaitan, menghasilkan ancaman terhadap kelangsungan hutan Amazon dan sekitarnya. Dalam kasus deforestasi Amazon, masalah krusial yang perlu dikaji adalah bahwa sistem ekonomi yang ada tidak dapat mencapai keseimbangan dengan keberlanjutan lingkungan hidup di Brazil. Selama tujuan skema ekonomi masih berfokus pada pengumpulan modal dan surplus tanpa batas, serta orientasi negara masih terfokus pada peningkatan pendapatan per kapita, maka lingkungan hidup akan terus terancam oleh eksploitasi demi memenuhi kepentingan ekonomi.

Kontribusi penelitian ini terhadap penelitian peneliti yaitu memberi

¹⁹ Tine Ratna Poerwantika, “Deforestasi Amazon Pada Era Bolsonaro (2019),” *Indonesian Journal of International Relations* 5, no. 2 (2021): 184–217.

informasi dan penjelasan terkait dinamika deforestasi di hutan Brazil didorong oleh kebijakan pro pasar Bolsonaro dengan landasan kepentingan nasional. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terdapat pada fokus penelitian yang hanya membahas deforestasi amazon pada era Bolsonaro pada tahun 2019 di awal pemerintahan Jair Bolsonaro.

Tinjauan pustaka yang ketiga merupakan artikel jurnal *Land Use Policy* dengan judul “Brazilian policy and agribusiness damage the Amazon rainforest”²⁰ yang ditulis oleh Eder Johnson de Area Leão Pereira, Luiz Carlos de Santana Ribeiros, Lúcio Flávio da Silva Freitas, dan Hernane Borges de Barros Pereira. Jurnal ini menjelaskan keterkaitan antara pemerintah dan kelompok petani berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Saat ini, kebijakan lingkungan memfasilitasi ekspansi produksi peternakan di daerah Amazon, Dimana presiden Bolsonaro beraliansi dengan kelompok parlemen yang memiliki kepentingan bertentangan dengan konservasi lingkungan telah mengarah pada kebijakan berbahaya yang mengancam lingkungan Brazil, kekuatan lobi agribisnis dalam mempengaruhi keputusan pemerintah, termasuk otorisasi penggunaan pestisida yang menyebabkan peningkatan penggunaan pestisida di pertanian Brazil.

Kontribusi penelitian ini terhadap penelitian peneliti yaitu memberi informasi dan penjelasan terkait hal yang menyebabkan deforestasi di Brazil, dimana dijelaskan bahwa sektor peternakan dan industri makanan

²⁰ Eder Johnson de Area Leão Pereira et al., “Brazilian policy and agribusiness damage the Amazon rainforest,” *Land use policy* 92 (2020): 104491.

dan minuman memiliki rasio emisi gas rumah kaca yang tertinggi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terdapat pada fokus penelitian yang berfokus pada dimana penjelasan perubahan kebijakan Brazil hanya dijelaskan secara garis besar saja, sehingga terdapat banyak sekali ruang kosong yang dapat peneliti gunakan untuk menunjukkan kebaruan-kebaruan dalam konteks serupa.

Tinjauan pustaka ke empat merupakan artikel jurnal *Environmental Science and Policy* dengan judul “Policy in Brazil (2016–2019) threaten conservation of the Amazon rainforest”²¹ yang ditulis oleh Eder Johnson de Area Leão Pereira, Paulo Jorge Silveira Ferreira, Luiz Carlos de Santana Ribeiro, Terciane Sabadini Carvalho, dan Hernane Borges de Barros Pereira. Jurnal ini menjelaskan terkait terpilihnya Jair Bolsonaro sebagai pemimpin Brazil telah mengangkat isu lingkungan, terutama dalam konteks laju deforestasi di Amazon, menjadi perdebatan politik. Risiko lingkungan meningkat jika sikap pemerintah saat ini tidak diperbaiki, dan hal ini dapat berdampak negatif pada masyarakat dan sistem terkait seperti ekonomi, politik, dan lingkungan.

Penting agar politik tidak mempengaruhi upaya konservasi hutan di Amazon, dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mengurangi laju deforestasi. Selain itu, penelitian tentang produktivitas lahan dan dukungan keuangan terhadap badan-badan yang berperan dalam melawan deforestasi, seperti Amazon Fund, IBAMA, dan ICMBio. Langkah-

²¹ Eder Johnson de Area Leão Pereira et al., "Policy in Brazil (2016–2019) Threaten Conservation of the Amazon Rainforest," *Environmental Science & Policy* (2019).

langkah seperti implementasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pengendalian Deforestasi di Amazon (PPCDAm) juga menjadi langkah penting dalam upaya melindungi hutan Amazon.

Dukungan dari masyarakat terus diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di Amazon dan mengurangi laju deforestasi. Kontribusi penelitian ini terhadap penelitian peneliti yaitu memberi informasi dan penjelasan terkait Pengaruh perubahan politik Brazil yang ditunjukkan melalui langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Jair Bolsonaro, mengancam konservasi hutan Amazon, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Tinjauan Pustaka kelima merupakan jurnal *Georgetown Journal Of International Law* dengan judul “The Amazon Is Burning—Is Paris, Too? A Comparative Analysis Between The United States And Brazil Based On The Paris Agreement On Climate Change”²² yang ditulis oleh Carolina Arlota. Jurnal ini menjelaskan terkait tindakan Brazil dalam menerapkan Perjanjian Paris menunjukkan bahwa Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengikuti strategi dan sikap Presiden Trump, dengan menggunakan bahasa yang provokatif, taktik mencari perhatian, dan kurang menghargai ilmu pengetahuan. Hal ini membuat Brazil menjadi penghalang kebijakan lingkungan dan merusak reputasinya sebagai pemimpin dalam tindakan perlindungan lingkungan. Kegiatan ekonomi utama di Amazon Brazil yang terkait dengan deforestasi adalah penanaman kedelai, produksi daging sapi,

²² Carolina Arlota, “The Amazon is burning-Is Paris, too? A comparative analysis between the United States and Brazil based on the Paris Agreement on climate change,” *Geo. J. Int’l L.* 52 (2020): 161.

dan pembangkit listrik tenaga air. Deforestasi di daerah tersebut sangat penting karena berdampak buruk pada kehidupan manusia dan non-manusia serta mempengaruhi seluruh dunia. Prinsip *common but differentiated responsibilities and respective capabilities* mengacu pada tanggung jawab yang berbeda yang diberikan di antara negara-negara, di mana sebagai anggota UNFCCC Amerika Serikat tetap terikat pada prinsip ini. Prinsip ini juga mengharuskan negara-negara berkembang, termasuk Brazil, untuk mempertimbangkan dampak kebijakan mereka terhadap emisi gas rumah kaca.

Temuan dari penelitian tersebut yaitu Kebijakan AS dan Brazil yang dibahas dalam jurnal ini membahayakan Perjanjian Paris dan perubahan iklim global. Perjanjian Paris terancam, tetapi masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan karena baik AS, Brazil, maupun dunia membutuhkan keberhasilan Perjanjian Paris. Kontribusi penelitian ini terhadap penelitian peneliti yaitu memberi informasi dan penjelasan terkait bagaimana perubahan kebijakan dari negara Brazil dapat mempengaruhi Perjanjian Paris. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terdapat pada fokus penelitian yang membahas perbandingan antara United States pada era Trump dengan Brazil pada era Bolsonaro.

Keenam terdapat artikel jurnal dengan judul “Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam Mengantarkan Singapura menjadi Negara Maju” yang ditulis oleh Insan Harapan Harahap²³, pada artikel

²³ Insan Harapan Harahap, “Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam Mengantarkan Singapura menjadi Negara Maju,” *Journal of Entrepreneurship, Management and Industry (JEMI)*

jurnal ini peneliti menggunakan konsep gaya kepemimpinan dalam melakukan risetnya. Menurut peneliti tantangan besar yang akan dihadapi oleh seorang pemimpin adalah bagaimana kemudian seorang pemimpin negara mampu menjadi wajah utama untuk negaranya. Metode penelitian yang digunakan oleh Insan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Pada kajian ini peneliti ingin menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan dan hasil kepemimpinan yang diperlihatkan oleh Lee Kuan Yew di masa pemerintahannya pada tahun 1959-1990. Walaupun pada masa kepemimpinannya mengalami pro dan kontra tetapi di masa beliau menjabat Lee memiliki legitimasi untuk memimpin serta mengimplementasikan setiap kebijakan agar bisa memberikan wajah baru untuk negaranya. Kesimpulan yang bisa diambil dari penulisan ini adalah seseorang pemimpin tidak serta merta dipahami menjadi sosok yang otoriter dalam kepemimpinannya. Pada masa kepemimpinannya Lee Perdana Menteri Singapura ini melakukan penggabungan gaya kepemimpinan yang otoritarian dengan demokratis atau yang disebut dengan mobokrasi atau hybrid regime, atau yang banyak dikenal sebagai ‘demokrasi ala Asia.’ Gaya kepemimpinan Lee menjadi alat dalam memelihara jalannya perekonomian dan politik Singapura yang berkinerja tinggi dan stabil pada waktu bersamaan. Gaya Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Lee ini ternyata bisa menghasilkan Singapura menuju negara yang maju dalam waktu tiga dekade yang dirasa singkat.

2, no. 1 (2019): 1–8.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Predominant Leader

Dalam dinamika suatu negara, terdapat beragam aktor dengan peran masing-masing. Setiap aktor ini memiliki tugas dan komposisi peran yang berbeda-beda. Di antara sekian banyak aktor yang terlibat, pemimpin berdiri sebagai aktor sentral, mengingat ia memiliki kendali atas banyak hal. Meskipun suatu tindakan atau keputusan pemerintah dipengaruhi oleh berbagai aspek, peran pemimpin tetap sangat dominan dalam proses ini.

Dalam penelitian yang peneliti kembangkan, terlihat jelas bagaimana Jair Bolsonaro memainkan peran dalam hal ini, dan dapat diklasifikasikan sebagai *Predominant Leader*. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji konsep ini menggunakan metode yang diusulkan oleh Hermann, dkk. dalam artikel mereka yang berjudul “*Who Leads Matters: The Effect of Powerful Individuals*”. Dalam tulisan tersebut, dicatat bahwa gaya kepemimpinan menjadi kunci untuk memahami dominasi seorang pemimpin. Dalam tulisan tersebut Margaret G. Hermann, dkk. mendefinisikan konsep *Predominant leader* sebagai sosok yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam suatu pemerintahan, terutama dalam hal pengambilan kebijakan.²⁴

Secara menyeluruh ada dua tipe gaya kepemimpinan yaitu *goal driven* dan *situationally/contextually responsive*. Pemimpin dengan gaya *goal driven* yang memiliki dorongan atas tujuannya biasa dikenal sebagai *the crusaders*,

²⁴ Margaret G Hermann et al., “Who leads matters: The effects of powerful individuals,” *International Studies Review* 3, no. 2 (2001): 83–131.

the ideologues dan mereka yang teratur, *task-oriented* atau *transformational in focus* menafsirkan lingkungannya dengan menggunakan lensa yang telah dibentuk oleh kepercayaan, motivasi, perilaku dan semangat (*passion*). Pemimpin yang memiliki sifat ini biasanya hidup dalam kebenaran diri sendiri yang ditentukan oleh analogi mereka tergantung dengan siapa mereka dan apa yang akan mereka kerjakan.²⁵

Kemudian, pemimpin *situationally/contextually responsive* atau yang lebih responsif terhadap situasi yang ada yaitu *the pragmatists, the opportunists*, dan mereka yang konsultatif, *relations-oriented*, atau *transactional* cenderung untuk berperan seperti pujangga yang melihat kehidupan sebagai sebuah teater yang terdapat banyak peran untuk dimainkan. Pemimpin seperti ini mencirikan diri mereka sebagai seorang yang fleksibel dan berpikiran terbuka (*open minded*). Mereka cenderung menyesuaikan perilaku dengan tuntutan situasi, memastikan posisi orang lain dalam suatu masalah dan memperkirakan bagaimana kelompok dan institusi cenderung bertindak. Pada intinya, citra diri pemimpin tersebut ditentukan oleh ekspektasi dan kepentingan orang lain. Agar dapat diterima, ide, sikap, keyakinan, motif dan semangat (*passion*) harus menerima validasi pihak eksternal dan konstituen lain yang relevan.²⁶

Lebih lanjut, Hermann, dkk. menjelaskan dua gaya kepemimpinan yang berbeda dalam diri seorang pemimpin dominan. Pemimpin dominan yang *contextually responsive* akan lebih sulit menanggapi situasi-situasi tertentu yang akan dibatasi oleh keadaan dimana mereka berada pada rekan-

²⁵ Hermann et al., "Who leads matters: The effects of powerful individuals." ,86-87.

²⁶ Hermann et al., "Who leads matters: The effects of powerful individuals." ,87-88.

rekannya yang lebih berorientasi pada tujuan. Mereka lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam konflik dan enggan untuk menggunakan sumber daya negara untuk perang kecuali pilihan tersebut didukung oleh faktor-faktor lainnya. Para pemimpin yang dapat menanggapi sesuai dengan situasi dapat mencari dukungan untuk pengambilan kebijakan luar negerinya, akan tertarik dengan pembangunan dan pendekatan multilateral terhadap kebijakan luar negeri, dan akan puas dengan pilihan yang dipilih. Pemimpin *contextually responsive* biasanya ditemukan dalam keadaan konflik guna melobi kepentingan tertentu.²⁷

Kemudian, pemimpin dominan yang *goal-driven* mendekati masalah kebijakan luar negeri dengan perspektif atau seperangkat prioritas kebijakan tertentu. Mereka cenderung menafsirkan dan merumuskan ulang situasi sedemikian rupa sehingga tujuan dan prinsip yang mereka anut menjadi faktor penentu dalam kebijakan luar negeri. Isu-isu seperti penurunan ekonomi, keamanan militer, dan imigrasi ilegal membentuk pandangan mereka tentang prioritas eksternal serta sikap mereka terhadap aktor-aktor lain. Bagi mereka, tantangan adalah sesuatu yang harus diatasi dan dihadapi, bukan sekadar diterima. Dengan semangat tinggi, pemimpin yang *goal-driven* ini berusaha menjalankan berbagai strategi untuk memastikan bahwa pembuatan kebijakan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka.

Untuk menggambarkan dominasi seorang pemimpin, Hermann, dkk. menguraikan tiga komponen utama yang menjadi indikator dominasi

²⁷ Hermann et al., "Who leads matters: The effects of powerful individuals." ,87-88.

dalam merumuskan kebijakan luar negeri, serta mengevaluasi sensitivitas pemimpin tersebut dalam konteks politik. Ketiga komponen tersebut meliputi:

1. *Reaction to Political Constraints* (Reaksi Terhadap Kendala Politik)

Parameter ini mengacu pada bagaimana kendala domestik dan internasional dapat memengaruhi pemimpin dalam segala tindakan yang diambilnya, tak terkecuali kebijakan luar negeri. Pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam menegosiasikan berbagai kendala politik guna membangun konsensus di antara anggota parlemen serta pihak-pihak internasional yang terkait dalam penyelesaian masalah politik tersebut. Ada berbagai cara bagi seorang pemimpin untuk berperan aktif dalam mengatasi kendala politik. Seorang pemimpin yang dominan bisa saja memanfaatkan kontrol dan kekuatannya untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Bagi seorang pemimpin yang *goal-driven*, kendala politik tidak akan menghalanginya dalam meraih sasaran yang diinginkan. Keyakinan (*beliefs*), sikap (*attitudes*), motif (*motives*), dan semangat (*passions*) yang dimiliki akan sangat mencerminkan bagaimana ia merespons berbagai fenomena yang dihadapinya. Di sisi lain, seorang pemimpin yang *situationally responsive*, akan menjalin konsensus dengan berbagai aktor di sekitarnya sebelum mengambil keputusan untuk mengatasi kendala politik yang ada.

2. *Openness to Information* (Keterbukaan pada Informasi/Input)

Parameter ini menguraikan bagaimana seorang pemimpin

menerima dan mengelola informasi yang masuk, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis keuntungan dan kerugian dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua pendekatan yang umumnya diterapkan oleh pemimpin terkait parameter ini. Pertama, pemimpin datang dengan visi atau agenda yang dirumuskan dengan baik, yang mencakup interpretasi data yang sudah diterimanya. Kedua, pemimpin yang mempelajari situasi dan merunutkan informasi terlebih dahulu, sebelum ia mengambil tindakan. Pemimpin yang *goal-driven* cenderung menerapkan pendekatan yang pertama, di mana mereka akan memaksakan visi dan agenda yang telah dirancangnya untuk diterapkan dalam kebijakan luar negeri. Pemimpin yang *goal-driven* cenderung mendorong aktor di sekitarnya untuk mengadopsi sudut pandangnya dalam mengelola informasi. Akibatnya, mereka sering kali menjadi pemimpin yang kurang terbuka dalam menerima masukan dari orang lain. Sedangkan pemimpin yang *situationally responsive* cenderung lebih terbuka dalam menerima masukan. Mereka akan dengan teliti menganalisis informasi yang diterima sebelum mendorong negara untuk mengambil langkah tertentu/tindakan.

3. *Motivation for Action* (Motivasi dalam Bertindak)

Parameter ini berusaha menjellaskan apa yang membentuk karakter seorang pemimpin dan apa yang menjadi prioritas pemimpin tersebut, sehingga memotivasinya untuk mengambil sebuah tindakan. Dalam konteks ini, terdapat dua aspek yang mencerminkan perbedaan dalam motivasi

seorang pemimpin. Pertama, pemimpin yang cenderung memprioritaskan masalah (*problem-focus*). Pemimpin dengan motivasi ini didorong oleh ide dan citra yang ia yakini, yang menjadi dasar bagi keputusan yang mereka ambil dalam menangani suatu permasalahan. Pemimpin dengan *problem-focus* dinilai kurang sensitif terhadap konteks politik, namun hal ini membuat mereka lebih tahu bagaimana seharusnya bertindak. Dengan motivasi tersebut, pemimpin jenis ini mampu menunjukkan mobilisasi dan efektivitas yang luar biasa dalam upaya mencapai suatu tujuan. Kedua, pemimpin yang mengedepankan relasi dan reaksi dai aktor lain (*relationship-focus*). Motivasi semacam ini mendorong para pemimpin untuk menjalin hubungan dengan berbagai aktor, yang pada gilirannya menghasilkan reaksi berupa validasi, dukungan, persetujuan, status, dan penerimaan dari pihak-pihak tersebut. Bagi pemimpin yang memiliki motivasi ini, kemampuan untuk melakukan persuasi dan negosiasi menjadi sangat krusial guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Setelah menguraikan parameter-parameter yang menjadi tolak ukur dalam menilai dominasi seorang pemimpin, Hermann, dkk. Kemudian merumuskan delapan gaya kepemimpinan yang dihasilkan atas hubungan timbal-balik dari parameter-parameter tersebut. Informasi ini dimuat dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Gaya Kepemimpinan dalam Fungsinya Atas Reaksi Terhadap Kendala Politik, Keterbukaan pada Informasi/Input, dan Motivasi

| Reaksi Terhadap Kendala Politik | Keterbukaan pada Informasi/Input | Motivasi | |
|--|----------------------------------|---|--|
| | | <i>Problem Focus</i> | <i>Relationship Focus</i> |
| Menentang Kendala Politik | Tertutup pada Informasi/Input | Expansionistic (Befokus pada perluasan kekuatan dan pengaruh) | Evangelistic (Befokus dalam persuasi dan melibatkan diri pada tujuan aktor lain) |
| menjadi pemimpin <i>crusader</i> | | | |
| Menentang Kendala Politik | Terbuka pada Informasi/Input | Incremental (Befokus untuk mempertahankan kemampuan sembari menghindari hambatan) | Charismatic (Befokus pada perwujudan agenda dengan melibatkan aktor lain) |
| seringkali menjadi pemimpin <i>strategic</i> | | | |
| Mencermati Kendala Politik | Tertutup pada Informasi/Input | Directive (Befokus pada konsistensi pribadi sembari bekerja dalam norma dan aturan) | Consultative (Befokus pada pemantauan terhadap dukungan aktor lain) |
| cenderung menjadi pemimpin <i>pragmatism</i> | | | |
| Mencermati Kendala Politik | Terbuka pada Informasi/Input | Reactive (Befokus dalam menilai apa yang mungkin dalam situasi terkini, serta mempertimbangkan apa yang diizinkan konstituen) | Accommodative (Befokus dalam menyatukan perbedaan dan membangun konsensus, serta memberdayakan aktor lain untuk berbagi peran dalam sebuah proses) |
| seringkali menjadi pemimpin <i>opportunistic</i> | | | |

Sumber: *Who Leads Matters: The Effect of Powerful Individuals*, 2001.

Tabel di atas menunjukkan bahwa analisis gaya kepemimpinan tidak berhenti pada tahapan merunutkan komponen-komponen yang menjadi

parameter tersebut. Berdasarkan elaborasi mengenai parameter *Reaction to Political Constraints* dan *Openness to Information*, Hermann, dkk. kemudian membentuk empat model gaya kepemimpinan seorang pemimpin, yaitu *crusader*, *strategic*, *pragmatism*, dan *opportunistic*.

Pertama, seorang pemimpin yang bertipe *crusader* cenderung bersikap tergesa-gesa. Dalam mengambil tindakan atau keputusan, ia tidak menunggu sampai momen yang dianggap tepat. Pemimpin dengan karakter ini percaya bahwa informasi yang dimilikinya sudah cukup untuk mendukung posisinya dalam menetapkan suatu keputusan. Selain itu, ia seringkali mampu menyampaikan argumen yang persuasif, sehingga langkah-langkah yang diambilnya tampak memiliki kredibilitas dan legitimasi. Kedua, pemimpin yang *strategic* adalah sosok yang memiliki keahlian dalam merumuskan strategi. Ia memahami langkah-langkah yang perlu diambil serta informasi apa yang harus dicari untuk mencapai tujuannya. Ketiga, seorang *pragmatism* adalah pemimpin yang menghormati batasan-batasan politik. Artinya, pemimpin ini memiliki visi dan tujuan yang ingin dia bawa ke dalam parlemen. Namun, di sisi lain, ia tetap ingin memastikan bahwa visi dan tujuan tersebut tidak melanggar batas serta porsi pekerjaan para aktor lainnya. Keempat, terdapat tipe pemimpin yang disebut *opportunistic*, yang merupakan kebalikan dari pemimpin *crusader*. Pemimpin *opportunistic* memiliki gaya kepemimpinan yang terbuka terhadap informasi dan masukan, serta menghargai batasan politik dari aktor lain. Mereka cenderung memaknai situasi dan mengambil tindakan berdasarkan dorongan yang datang dari berbagai pihak. Oleh karena itu, model kepemimpinan ini sering dianggap

bijaksana dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian konsep predominant leader oleh Hermann, dkk., tampak jelas bahwa seorang pemimpin yang dominan memiliki dampak signifikan dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Hermann, dkk. mencoba meruntukan serangkaian tahapan dan parameter yang membentuk satu kesatuan dalam konsep ini.

Mengacu pada konsep predominant leaders yang dikemukakan oleh Margaret G. Hermann dkk., peneliti menilai bahwa konsep tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam analisis permasalahan yang sedang dibahas. Konsep ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kepemimpinan dominan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu, konsep ini juga merinci berbagai tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin serta bagaimana peran pemimpin tersebut sebagai aktor politik yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi negara.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi merujuk pada serangkaian prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Metode penelitian sendiri adalah langkah-langkah ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan untuk menemukan, membuktikan, dan mengembangkan pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi masalah yang ada.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif berguna untuk menggali dan memahami aspek-aspek yang tersembunyi di balik fenomena yang seringkali sulit untuk dianalisis secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai makna dan konteks yang mungkin tidak tampak secara jelas pada pandangan pertama.²⁸ Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa pendekatan penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan perubahan kebijakan lingkungan di Brasil selama masa pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro terkait isu perubahan iklim. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif, di mana fenomena yang ada akan dianalisis secara mendalam dengan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai peristiwa atau isu yang diangkat dalam kajian ini.²⁹ Pemilihan jenis penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan rinci dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.

1.8.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberi batasan yaitu pada periode kepemimpinan Jair Bolsonaro sebagai presiden Brazil. Karena pada masa Pemerintahan Jair Bolsonaro pemerintah Brazil melakukan pengurangan keterlibatan dalam Perjanjian Paris dengan alasan tidak menguntungkan ekonomi Brazil. Hal tersebut diikuti dengan

²⁸ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Equilibrium* 5, no. 9 (2009): 2.

²⁹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 186–187.

pengurangan pengawasan hutan, peningkatan eksploitasi sumber daya alam, kebijakan pro petani, dan penurunan pendanaan untuk perlindungan hutan. Kebijakan Bolsonaro berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang melihat perhatian yang besar terhadap isu perubahan iklim. Sehingga penelitian ini hanya berfokus pada perubahan kebijakan lingkungan Brazil pada masa pemerintahan presiden Jair Bolsonaro terhadap perubahan iklim yang berjalan selama masa Pemerintahan Jair Bolsonaro yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2022.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Serkan Dolma menjelaskan bahwa unit analisis merujuk pada entitas yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian ilmiah. Dalam konteks penelitian, unit analisis adalah elemen yang akan dianalisis dan dijadikan dasar untuk memperoleh hasil serta menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian tersebut.³⁰ Jika disederhanakan, unit analisis adalah elemen yang hendak diuraikan secara mendalam dalam sebuah penelitian. Untuk penelitian ini, peneliti menetapkan unit analisis di tingkat individu, yaitu Presiden Brazil tahun 2019-2022, Jair Messias Bolsonaro. Dalam penelitian ini, unit analisis berperan sebagai variabel dependen, karena unit inilah yang akan dideskripsikan, dieksplorasi, dan diprediksi secara lebih detail. Unit analisis tidak akan berguna jika tidak disandingkan dengan unit eksplanasi. Karena unit eksplanasi merupakan elemen dalam penelitian yang pengaruhnya akan diteliti terhadap unit analisis. Hal ini menjadikan unit eksplanasi sebagai

³⁰ Serkan Dolma, "The Central Role of the Unit of Analysis Concept in Research Design," *Istanbul University Journal of the School of Business Administration* 39, no. 1 (2010): 169–174.

variabel independen, karena kehadirannya memengaruhi variabel dependen.³¹ Sedangkan unit eksplanasinya atau variabel independenya dalam penelitian ini adalah melihat gaya kepemimpinan Jair Bolsonaro dalam kebijakan lingkungan Brazil pada studi kasus isu perubahan iklim. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba menguraikan gaya kepemimpinan yang diberikan Jair Bolsonaro dalam proses perumusan kebijakan lingkungan Brazil.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur akademik, serta memanfaatkan data yang diperoleh melalui situs web resmi pemerintah Brasil dan lembaga internasional, seperti *Ministry of the Environment of Brazil*, *UNFCCC*, *UN*, *Climate Change Secretariat*, *Imazon* dan website resmi pemerintahan lainnya. Laman dari website tersebut berisikan laporan resmi, agenda kebijakan serta data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

Peneliti juga mengumpulkan data dari berbagai kanal berita internasional. Dalam hal ini, kata kunci yang seringkali peneliti gunakan adalah *Jair Bolsonaro*, *Climate Change*, *Brazil Deforestation*, *Net Zero Emissions* dan *Paris Agreement*. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari tulisan-tulisan Margaret G. Hermann, seorang

³¹ Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1990).

peneliti hubungan internasional yang berfokus pada kajian di level individu, sehingga berguna bagi peneliti untuk mengembangkan analisis di level serupa. Dan buku pendukung lainnya. Selain itu terdapat jurnal-jurnal internasional yang peneliti gunakan sebagai sumber informasi terkait penelitian. Data yang peneliti kumpulkan juga bersumber dari buku, pidato, media online, berita dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data terkait penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam menyusun informasi yang diperoleh selama penelitian secara terstruktur dan sistematis. Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu, menguraikan data menjadi unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesis, menyusun data dalam bentuk pola, dan akhirnya menarik kesimpulan yang memudahkan pemahaman baik untuk peneliti maupun pembaca lainnya. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik yang mencakup pengorganisasian, seleksi, dan penyaringan data berdasarkan indikator tertentu, untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul. Peneliti juga akan menentukan hal-hal yang penting dan relevan untuk dipelajari, serta memutuskan informasi mana yang akan disampaikan kepada orang lain.³²

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data yang diperkenalkan oleh Miles, Huberman dan

³² Lexy J. Malong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), 248

Saldana, yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.³³

1. Kondensasi data

Kondensasi data adalah langkah untuk memilah, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber seperti dokumen, catatan lapangan, dan data empiris lainnya. Proses ini melibatkan penggunaan kalimat sendiri untuk merangkum data tersebut. Peneliti akan memilih data yang relevan dan menghilangkan data yang dianggap tidak relevan berdasarkan informasi yang dimiliki.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, kumpulan informasi yang kemudian diolah dan disusun dalam bentuk tulisan yang lebih runut. Dalam menyusun data, peneliti melakukan pengorganisasian dan pengolahan informasi yang dikumpulkan menjadi tulisan yang terstruktur. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan langkah terakhir dalam analisis data, di mana kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh diambil. Data tersebut kemudian digunakan untuk memperkuat tulisan dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

³³ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, Johnny Saldaña .*Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebooks, 3rd Edition* (Sage Publication, 2014):3-16.

Bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian, sekaligus sebagai pengantar bagi para pembaca untuk memahami konteks penelitian. Di dalam bab ini, peneliti memaparkan latar belakang masalah yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan menghubungkan berbagai aspek yang relevan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga merumuskan masalah, menyusun pertanyaan penelitian, menetapkan tujuan penelitian, serta mengidentifikasi manfaat penelitian yang mencakup manfaat teoritis dan praktis. Selanjutnya, penelitian ini juga mengulas studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya sebagai referensi dan perbandingan, serta menyajikan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian. Selanjutnya, bab ini juga mencakup penjelasan mengenai metodologi penelitian, yang meliputi jenis penelitian, batasan penelitian, unit analisis, serta teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Peneliti juga menguraikan langkah-langkah yang dilakukan sepanjang proses penelitian, yang disusun dalam sistematika penulisan pada bagian akhir bab ini. Semua elemen yang dijelaskan dalam bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh kepada pembaca, sehingga mereka dapat memahami permasalahan inti yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB II Karier Politik Jair Bolsonaro

Bab II merupakan bagian yang menguraikan tentang unit analisis dan aktor utama dalam penelitian ini. Bab ini akan berfokus pada uraian tentang profil dan karier politik seorang Jair Bolsonaro. Peneliti berupaya

untuk menyajikan informasi sepadat mungkin mengenai karier politik Jair Bolsonaro, mulai dari masa masa awalnya menjajaki dunia politik hingga menjabat menjadi presiden.

BAB III Dinamika Perubahan Iklim

Bab III merupakan bagian dalam penelitian ini yang berperan dalam mengelaborasi informasi yang berkaitan dengan unit eksplanasi, yaitu kebijakan perubahan iklim Brazil . Penjelasan bab ini tidak hanya terpaku pada kebijakan perubahan iklim yang ditetapkan Brazil pada saat pemerintahan Jair Bolsonaro, namun juga mencoba melihat kebijakan perubahan iklim pada masa-masa pemerintahan terdahulu. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran umum tentang gaya dan pola kepemimpinan Presiden Brazil. Selain itu, peneliti juga akan memaparkan informasi tentang permasalahan lingkungan yang melanda Brazil termasuk permasalahan deforestasi Amazon, karena permasalahan tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian ini.

BAB IV Gaya Kepemimpinan Jair Bolsonaro dalam Kebijakan Perubahan Iklim Brazil

Bab IV merupakan bagian yang berfokus pada pembuktian dalam penelitian ini. Di bab ini, peneliti akan menguraikan analisis mengenai gaya kepemimpinan Jair Bolsonaro dalam kebijakan perubahan iklim di Brasil. Analisis yang disajikan berasal dari hasil riset yang diolah menggunakan konsep predominant leader yang diperkenalkan oleh Margaret G. Hermann dalam karyanya *Who Leads Matters: The Effect of*

Powerful Individuals. Bab ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada bab I, sehingga pembaca dapat memahami secara mendalam bagaimana Jair Bolsonaro menerapkan gaya kepemimpinan dalam kebijakan perubahan iklim yang diambilnya.

BAB V Penutup

Bab V merupakan bagian penutup dalam penelitian ini, yang berfungsi untuk menyimpulkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini sangat penting karena memberikan rangkuman dari keseluruhan isi penelitian secara ringkas, jelas, dan padat. Di bab ini, peneliti juga akan memberikan saran dan rekomendasi yang berguna bagi pembaca dan peneliti lainnya, agar dapat melengkapi dan mengembangkan penelitian ini dengan merujuk pada sumber-sumber literatur lainnya. Selain itu, bab ini juga akan menyertakan daftar pustaka yang mencantumkan semua referensi yang digunakan dan dirujuk oleh peneliti sepanjang proses penyusunan penelitian ini.

